



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 548/KPTS/BAPPEDA LITBANG/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

TAHUN 2021-2026

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan diikuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KETIGA : Penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pelaksanaannya mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 548/KPTS/BAPPEDA LITBANG/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100$	Seluruh PD
		Persentase Penduduk Miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Seluruh PD
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100$	Seluruh PD
	1.1. Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	PAD sektor pariwisata	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100$	Dinas Parbud
	1.2. Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$	Dinas Pertanian/ Diskanak
		Nilai tukar petani (NTP)	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$	Dinas Pertanian
		Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Target daerah (ton)}} \times 100$	Diskanak
	1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	$\frac{\text{Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	$\frac{\text{kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$	Dinas Koperasi, UKM, Perindag

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	1.4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pendapatan per kapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity)	Dinas Sosial
	1.5. Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan		Indeks reformasi birokrasi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB	
	2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Setda/Set DPRD
		Indeks kualitas perencanaan	Hasil pengukuran indeks kualitas perencanaan	Bappeda Litbang
		Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKAD/Bapenda
	2.2. Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Setda/Disdukcapil/Bappeda Litbang/BKPSDM
		Skor indeks inovasi daerah	Skor indeks inovasi daerah	Bappeda Litbang/ Setda
	2.3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	Skor maturitas SPIP	Hasil penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Inspektorat Kabupaten
3. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	$\sqrt[3]{l_{\text{kesehatan}} \times l_{\text{pendidikan}} \times l_{\text{pengeluaran}}}$	Seluruh PD
		Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Seluruh PD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	3.1. Meningkatnya akses pendidikan berkualitas	Angka harapan lama sekolah		Seluruh PD
		APM SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun dijenjang SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan
		APM SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 – 15 Tahun dijenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan
		APM SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16 – 18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16 – 18 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan
		APK (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca.	DPK
4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	$\sqrt[3]{l_{\text{kesehatan}} \times l_{\text{pendidikan}} \times l_{\text{pengeluaran}}}$	Seluruh PD
		Angka usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Seluruh PD
	4.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100$	Dinas Kesehatan
		Kematian bayi	Jumlah kematian bayi	Dinas Kesehatan
		Kematian ibu	Jumlah kematian ibu	Dinas Kesehatan
		Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	$\frac{\text{Jumlah anak baduta sangat pendek (stunting)}}{\text{Jumlah anak 0 – 4 tahun}} \times 100$	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)	Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)	Dinas Kesehatan
		Cakupan peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	Dinas PPKBP3A
	4.2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat pada Porprov	Peringkat pada Porprov	Diskepora
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		Indeks pembangunan gender (IPG)	IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada penghitungan IPG digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.	Seluruh PD
		Indeks pemberdayaan gender (IDG)	IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.	Seluruh PD
	5.1. Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	Kategori kabupaten layak anak (KLA)	Kategori kabupaten layak anak (KLA)	Dinas PPKBP3A
		Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Dinas PPKBP3A
6. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas		Rata-rata waktu tempuh jalan Kabupaten	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Seluruh PD
		Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya}} \times 100$	Seluruh PD
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100$	Seluruh PD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	6.1. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik (km)}}{\text{Panjang jalan seluruhnya (km)}} \times 100$	Dinas PUPR
		Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah unit rumah layak huni}}{\text{Jumlah unit rumah tinggal Kabupaten}} \times 100$	Dinas Perkim
		Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Dinas PUPR
		Rasio Elektrifikasi	$\frac{\text{Pelanggan RT listrik PLN} - \text{Pelanggan RT listrik non PLN}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	Dinas Perkim
		Cakupan layanan telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}} \times 100$	Diskominfo
	6.2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	$\frac{\text{Jml kecepatan respon 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100$	BPBD
	6.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	$\sqrt{(C_i L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i / L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}$	DLH
		Indeks kualitas udara	$\text{IKU} = 100 - [50 / 0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$	DLH
		Indeks kualitas lahan	$\text{IKTL} = 100 - ((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$	DLH
	6.4. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	$\frac{\text{Jumlah Desa tertinggal} + \text{Jumlah Desa sangat tertinggal}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Dinas PMPD
	6.5. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah (Ha)}}$	Dinas PUPR
7. Meningkatkan investasi yang kondusif		Nilai investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	Seluruh PD
	7.1. Meningkatnya	Jumlah investor berskala	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas PMPTSP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	investasi	nasional (PMDN/PMA)		
	7.2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	$\frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15 – 64 tahun)}} \times 100\%$	Dinas Nakertrans
	7.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang ditangani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Badan Kesbangpol

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO